



**KEPALA DESA BANJARDAWA
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA BANJARDAWA
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERPANJANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
BANJARDAWA KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2026 - 2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJARDAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa guna menyesuaikan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu adanya penyesuaian perencanaan pembangunan desa yang bertujuan lebih menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Desa Banjardawa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2019 - 2025 perlu dilakukan penyesuaian guna penambahan 2 (dua) tahun periode perencanaan pembangunan desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perpanjangan Rencana Pembangunan Menengah Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2026 - 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang;
19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
20. Peraturan Desa Banjardawa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARDAWA
dan
KEPALA DESA BANJARDAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERPANJANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
BANJARDAWA KECAMATAN TAMAN KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2026-2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banjardawa.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjardawa Tahun 2026-2027.
3. Perpanjangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2026-2027 adalah Rencana Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa Tahun 2026-2027 adalah dokumen perencanaan pembangunan desa berupa penambahan 2 periode tahun perencanaan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

Dalam dokumen RPJMDesa Tahun 2026-2027 dirinci berdasarkan bidang, program, dan kegiatan yang menjadi prioritas.

Pasal 3

- (1) RPJMDesa Tahun 2026-2027 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Demografi
 - 2.1.3. Keadaan Sosial
 - 2.1.4. Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Desa

BAB III : MASALAH DAN POTENSI

- 3.1. Masalah
- 3.2. Potensi

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1. Visi Dan Misi
 - 4.1.1. Visi Desa
 - 4.1.2. Misi
- 4.2. Kebijakan Pembangunan
 - 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 4.2.2 Potensi Dan Masalah
 - 4.2.3 Program Pembangunan Desa
 - 4.2.4 Strategi Pencapaian

BAB V : PENUTUP

- (2) Lampiran RPJMDesa Tahun 2026-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Matrik Program Kegiatan
 - b. Data Rencana Program & Kegiatan Pembangunan yang akan masuk ke Desa
 - c. Rekapitulasi Usulan rencana kegiatan desa dari dusun dan atau kelompok masyarakat (*Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan*)
 - d. Berita Acara hasil pengkajian desa dan beserta Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
 - e. Berita Acara Musyawarah (*Musdus, Musdes dan Musrenbang Desa*)
 - f. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (*Musdus, Musdes dan Musrenbang Desa*)
 - g. Berita acara penyusunan rancangan RPJMDesa
 - h. Notulen Musyawarah (*Musdus, Lokakarya, Musrenbang Desa*)

- i. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa
- j. Peta Desa
- k. Foto Kegiatan/Foto Desa (*Musdus, Musdes, Musrenbang Desa*)

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJMDesa Tahun 2026-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RPJMDesa Tahun 2026-2027 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang.

Pasal 6

RPJMDesa Tahun 2026-2027 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di desa dalam melaksanakan perencanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2026-2027.

Pasal 7

RPJMDesa Tahun 2026-2027 wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Desa Banjardawa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2025 telah selesai, maka RPJMDesa Tahun 2026-2027 menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan, Kepala Desa yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP Desa untuk periode pemerintahan Kepala Desa berikutnya.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai

pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa periode pemerintahan Kepala Desa berikutnya.

Pasal 9

RKP Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

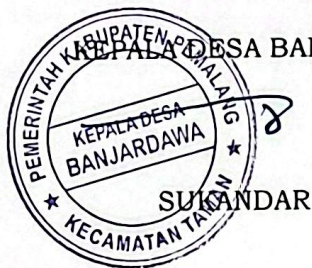
Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Banjardawa
pada tanggal 2 September 2024

Paraf Hirarki	
Kaur	Sekdes
	



Diundangkan di Banjardawa
pada tanggal 2 September 2024



SEKRETARIS DESA BANJARDAWA,

LEMBARAN DESA BANJARDAWA TAHUN 2024 NOMOR 2